

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Arab Saudi selama ini dikenal sebagai negara pengeksport minyak terbesar di dunia. Semenjak penemuan cadangan minyak pada tahun 1938, Arab Saudi secara konsisten menjadi negara penghasil minyak terbesar di dunia. Negara ini berhasil menguasai pasar minyak dunia dengan menjadi pemasok minyak utama ke berbagai negara di dunia. Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh *Energy Information Administration*, Arab Saudi menduduki posisi pertama dari tahun 1989 sampai tahun 2016 sebagai negara pengeksport minyak.¹

Sampai pada tahun 2014 harga minyak mengalami penurunan yang drastis. Dari yang awalnya \$100 per barel turun di bawah \$50 per barel. dan di prediksi harga minyak belum akan kembali dalam waktu dekat. Permasalahan ini mengancam kestabilan ekonomi Arab Saudi yang selama ini bergantung dengan sektor minyak. Hal ini dibuktikan dengan 72 persen pendapatan Arab Saudi berasal dari pendapatan minyak dan 28 persen berasal dari pendapatan non-minyak.² Ketergantungan ini menyebabkan ekonomi Arab Saudi mengalami defisit 367 miliar riyal (\$97,9 miliar).

Disamping itu Arab Saudi masih memiliki permasalahan dengan tingkat pengangguran yang tinggi terutama dari kalangan perempuan.³ Pada tahun 2014 saat defisit ekonomi terjadi, presentase tingkat pengangguran Arab Saudi

¹ Energy Information Administration <http://www.eia.gov> (diakses pada 10 Desember 2019).

² KPMG. "*Kingdom of Saudi Arabia Budget Report*" (2018): 6.*

³ Revisologi, *Gender Equality in Saudi Arabia*, <https://revisesociology.com/2017/01/22/gender-equality-in-saudi-arabia/>, tanggal akses 15 Desember 2019

di dominasi oleh jumlah perempuan dibandingkan laki-laki. Berdasarkan data yang diambil dari laporan The Global Economy sejak tahun 1991 pada tahun 2014 presentase pengangguran di Arab Saudi untuk perempuan konsisten mengalami kenaikan dan yang tertinggi pada tahun 2014 mencapai 21.66 persen sedangkan untuk laki-laki konsisten mengalami penurunan yakni berada pada 2.77 persen di tahun 2014.⁴

Pada April 2016 Putra Mahkota Arab Saudi, Mohammed bin Salman (MBS) mengumumkan “*Vision 2030*” yang membuat Arab Saudi menjadi perhatian dunia. Hal ini dikarenakan *Vision 2030* mengandung target-target sangat berbeda dengan kebiasaan Arab Saudi pada umumnya. Tidak hanya berupaya mengurangi pendapatan dari ekspor minyak namun juga kergantungan minyak di dalam negerinya dengan menaikkan harga BBM hingga dua kali lipat. *Vision 2030* mengandung target reformasi dan diversifikasi ekonomi untuk melepaskan ketergantungan ekonominya pada minyak menuju sistem ekonomi yang lebih moderat.⁵

Vision 2030 sendiri menyiratkan derajat liberalisasi sosial untuk memungkinkan tumbuhnya industri hiburan dan pariwisata, serta reformasi ekstensif terhadap sistem pendidikan.⁶ Yang menarik dalam visi tersebut terdapat komitmen untuk “*Providing Equal Opportunities*” yang menunjukkan komitmen

⁴ The Global Economy, *Saudi Arabia Unemployment Chart*, https://www.theglobaleconomy.com/Saudi-Arabia/Male_unemployment/ (diakses 16 Desember 2019)

⁵ Naasem, Sana. Kamini Dhruva. 2017. *Issues and Challenges of Saudi Female Labor Force and the Role of Vision 2030: A Working Paper*. International Journal of Economics and Financial Issues 2017, 7(4), 23-27.

⁶ Jane Kinninmont, 2017. *Vision 2030 and Saudi Arabia's Social Contract Austerity and Transformation*, Middle East and North Africa Programme. Chatam House.

pemerintah untuk menciptakan peluang yang setara bagi masyarakat Arab Saudi diikuti penjelasan:

“Saudi women are yet another great asset. With over 50 percent of our university graduates being female, we wil continue to develop their talents, invest in their productive capabilities and enable them to strengthen their future and contribute to the development of our society and economy”
(Visions 2030 pp-37)

Kemudian dalam mencapai komitmen tersebut pemerintah mengumumkan poin “Meningkatkan partisipasi perempuan di dunia kerja dari 22% menjadi 30%” yang menunjukkan presentase baru yang diberikan pemerintah untuk menghimbau partisipasi tenaga kerja perempuan.⁷ Selanjutnya Muhammad bin Salman menerapkan tindakan untuk menyingkirkan fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh ulama, diantaranya adalah fatwa tentang larangan bagi perempuan untuk beraktivitas di luar rumah dan bekerja. Muhammad bin Salman menyatakan bahwa kaum perempuan harus memiliki produktivitas dan sejajar dengan laki-laki dalam memajukan negara secara aktif.

Komitmen ini sejalan dengan beberapa norma dalam *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women* (CEDAW) pada Desember 1979 pada Pasal 3 yang menyatakan negara harus menjamin kebebasan proses pengembangan diri demi kemajuan perempuan, terlindunginya hak asasi manusia mereka, serta kebebasan mendasar atas kesetaraan dengan laki-laki.⁸ Kebebasan ini harus mencakup semua bidang khususnya dalam bidang politik, sosial ekonomi dan budaya. Serta pada Pasal 8 menyatakan negara harus mengambil langkah-langkah yang tepat untuk memastikan tidak adanya

⁷ *Vision 2030*, <https://vision2030.gov.sa/en> (diakses 30 Oktober 2019)

⁸ *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* Adopted and opened for signature, ratification and accession by General Assembly resolution 34/180 of 18 December 1979 entry into force 3 September 1981, in accordance with article 27(1)

diskriminasi terhadap perempuan, agar perempuan memiliki kesempatan untuk mewakili pemerintah mereka pada tingkat internasional dan untuk berpartisipasi dalam pekerjaan organisasi-organisasi internasional, atas dasar persamaan dengan laki-laki dan tanpa diskriminasi apapun.⁹ Maka sebagai negara yang meratifikasi perjanjian ini, Arab Saudi diwajibkan untuk memenuhi semua tuntutan perjanjian CEDAW dalam rangka menghapuskan angka diskriminasi gender.

Menurut data pada November 2017 yang dirilis oleh *General Organization Social Insurance of Saudi Arabia*, pasca diluncurkannya *Visions 2030* lebih dari 500.000 perempuan memasuki pasar tenaga kerja di sektor publik dan swasta dalam tujuh bulan pertama di tahun 2017. Mayoritas pekerjaan sektor swasta yang dimasuki angkatan kerja wanita adalah di sektor dagang, perhotelan, jasa dan konstruksi. Dua sektor pertama ini telah menjadi fokus utama pemerintah yang bertujuan mendorong perempuan untuk memasuki dunia kerja.¹⁰

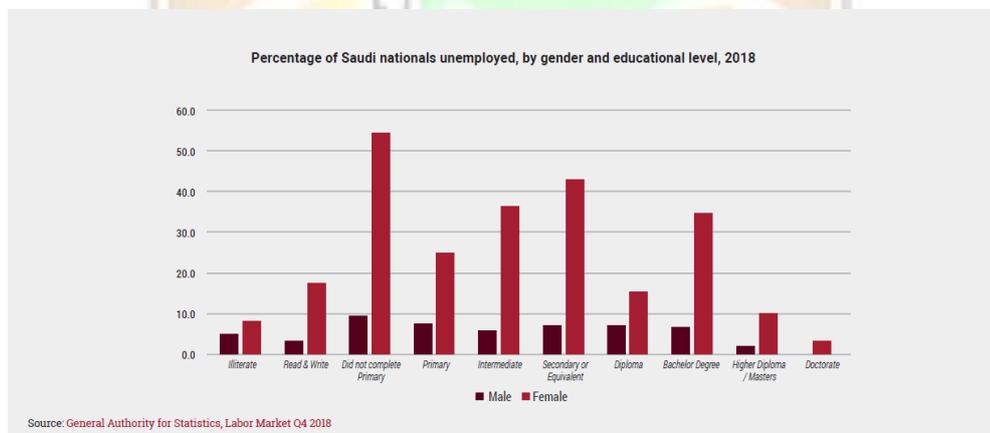
Perubahan sikap pemerintah Arab Saudi ini dianggap menjadi angin segar bagi permasalahan gender yang selama ini dianggap menghambat kemajuan perempuan. Meskipun begitu, tinjauan aturan baru dalam visi ini belum berlaku pada bidang korporasi dan hukum properti, mereka masih menghadapi diskriminasi dalam sistem hukum contohnya nilai kesaksian dua wanita dianggap setara dengan hanya satu laki-laki. Berdasarkan laporan gender gap dari World Economic Forum sebelum Vision 2030 di luncurkan Arab Saudi menempati posisi ke 141 dari 144

⁹ Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women Adopted and opened for signature, ratification and accession by General Assembly resolution 34/180 of 18 December 1979 entry into force 3 September 1981, in accordance with article 27(1)

¹⁰ King, A.G. (1978), *Industrial structure, the flexibility of working hours and women's labor force participation*. Review of Economics and Statistics, 60, 399-407.

negara untuk kesetaraan gender. Setelah peluncuran *Vision 2030*, pada Desember 2018 Arab Saudi masih diposisi terendah diposisi ke 141 dari 149 negara untuk kesetaraan gender.¹¹ Menempatkan Arab Saudi negara dengan tingkat kesetaraan gender terburuk ke delapan di dunia pada tahun 2018. Hal ini menunjukkan bahwa belum ada perubahan terhadap *gender gap* sebelum ataupun sesudah peluncuran dan pelaksanaan *Visions 2030* tersebut.

Selain itu, perempuan masih menghadapi diskriminasi di dunia kerja, terutama dalam mencari pekerjaan sesuai dengan pendidikan dan kompetensi yang mereka miliki, berdasarkan data General Authority for Statistics di tahun 2018 angka pengangguran Saudi masih di dominasi perempuan meskipun mereka telah memiliki gelar pendidikan hingga Doktor.



Gambar 1.1 Presentase Pengangguran Nasional Saudi Berdasarkan Gender dan Tingkat Pendidikan di Tahun 2018

(Sumber : General Authority For Statistic , Labor Market 2018 dalam *The Labor Market in Saudi Arabia: Background, Areas of Progress, and Insights for the Future* , Harvard Kennedy School Evidence for Policy Design)

Salah satu alasan utama rendahnya tingkat pekerjaan bagi perempuan Saudi adalah beban biaya tambahan bagi perusahaan, karena mereka harus mengeluarkan

biaya untuk menciptakan alur dan fasilitas terpisah bagi laki-laki dan perempuan.¹² Disamping itu masih banyak peraturan-peraturan lain masih membatasi gerak perempuan di Arab Saudi. Berikut ini adalah norma dan peraturan yang masih di pertahankan yang sangat mempengaruhi partisipasi perempuan di dunia kerja:

Tabel 1.1

Aturan yang Masih Berlaku Bagi Perempuan di Arab Saudi

No.	Jenis Aturan	Keterangan
1	Sistem perwalian (<i>Guardianship system</i>)	Sistem ini sering mendapat kecaman para aktivis kesetaraan gender karena menghambat mobilitas perempuan, meskipun semenjak tahun 2018 pemerintah telah menghapus beberapa peraturan sistem seperti larangan menyetir dan larangan bepergian sendiri, sistem perwalian terhadap perempuan di Arab Saudi sampai saat ini masih di pertahankan.
2	Mendapatkan Paspor	Perempuan tidak diperkenankan membuat paspor tanpa izin dari walinya.
3	Berpakaian sesuka hati	Perempuan harus mengenakan jubah hitam panjang dan longgar yang disebut abaya saat berada di depan umum.
4	Berinteraksi bebas dengan pria	Perempuan dilarang berbicara dengan bebas apabila bukan dengan suami atau saudaranya (bukan muhrim). Meski ditempat umum seperti sekolah, bank, kantor, restoran, dan lain-lain sudah didesain terpisah berdasarkan jenis kelamin.
5	Membuka Rekening bank	Untuk membuka rekening Bank, perempuan mesti mendapatkan izin dari walinya.
6	Hak waris	Hak waris perempuan hanya setengahnya dari hak waris saudara laki-lakinya. Tidak dapat dipungkiri budaya <i>patrilocality</i> di negara ini kerap melemahkan ekonomi perempuan seperti pengurangan hak waris serta kecenderungan nvestasi orang tua yang lebih mengutamakan investasi pada karir anak laki-laki dibanding perempuan
7	Izin Penanganan Medis	Perempuan harus mendapatkan izin dari wali. Bahkan ketika kasusnya pun sudah membahayakan nyawa, izin dari wali tetap diperlukan. ¹³
8	Menikah dan Bercerai	Menurut <i>Women's Rights Report: Discrimination in the Punishment of Women</i> . selain semakin terhambatnya mobilitas saat menikah, mereka juga harus menghadapi kenyataan sewaktu waktu dapat di poligami dan tidak dapat mengajukan perceraian

¹² *The Labor Market in Saudi Arabia: Background, Areas of Progress, and Insights for the Future* , Harvard Kennedy School Evidence for Policy Design.

¹³ Sana Naasem, Kamini Dhruva, 2017, *Issues and Challenges of Saudi Female Labor Force and the Role of Vision 2030: A Working Paper*, International Journal of Economics and Financial Issues 2017, 7(4), pp 23-27

		akibat diskriminasi sosial dan secara hukum ketika seorang wanita mengajukan perceraian, dia tidak menerima tunjangan apapun, properti, atau penghasilan yang atas nama suaminya dan bahkan mungkin diminta untuk mengembalikan mahar. Hal ini menyebabkan kondisi perempuan sangat lemah pasca perceraian.
--	--	---

Tabel 1.1 Aturan yang Masih Berlaku Bagi Perempuan di Arab Saudi

(Sumber: Ahmed Al-Asfour, Hayfaa A. Tlaiss, Sami A. Khan, James Rajasekar, (2017) "Saudi women's work challenges and barriers to career advancement", Career Development International, Vol. 22 Issue: 2, pp.184-199, doi:10.1108/CDI-11-2016-0200

Larangan-larangan tersebut dibuat dengan dasar yang berbeda-beda, ada yang berdasarkan hukum Islam, alasan keamanan, ataupun tafsir atas kebutuhan sosial setempat. Rakan Alharb dalam tulisannya *Guardianship Law in Saudi Arabia and Its Effects on Women's Rights* menjelaskan bagaimana aturan-aturan ini telah melanggar Hak Azasi Manusia (HAM) serta menciderai nilai-nilai kesetaraan gender. Beberapa negara Islam lainnya ditemukan menerapkan beberapa aturan yang serupa. Poin-poin norma dan aturan tersebut menunjukkan masih terbatasnya ruang gerak perempuan Arab Saudi di dunia kerja serta dalam mendapatkan pekerjaan yang menyatakan bahwa masih banyak perusahaan yang sama sekali tidak ingin mempekerjakan perempuan.

Sehingga penting untuk dilakukan analisis yang mendalam mengenai upaya yang dilakukan pemerintah Mohammed Bin Salman dalam menciptakan peluang yang setara antara laki-laki dan perempuan serta dalam upaya pemberdayaan ekonomi perempuan dengan serangkaian kebijakan dan peraturan-peraturan yang dinilai masih menghambat kebebasan dan ruang gerak perempuan di dunia kerja.

1.2 Rumusan Masalah

Arab Saudi selama ini dikenal sebagai negara pengekspor minyak terbesar di dunia. Hingga pada tahun 2014 defisit ekonomi terjadi akibat jatuhnya harga

minyak mengancam kestabilan ekonomi Arab Saudi yang selama ini bergantung dengan sektor minyak hingga 70 persen. Serta masih tingginya permasalahan tingkat pengangguran dari kalangan perempuan. Pada April 2016 Putra Mahkota Arab Saudi, Mohammed bin Salman (MBS) mengumumkan “*Vision 2030*” yang isinya mengandung target reformasi melepaskan ketergantungan ekonominya pada minyak menuju sistem ekonomi yang lebih moderat. *Vision 2030* menyiratkan derajat liberalisasi sosial untuk memungkinkan tumbuhnya industri hiburan dan pariwisata. Serta dalam *Vision 2030* Mohammed Bin Salman menyatakan komitmennya memberdayakan ekonomi perempuan agar lebih terlibat aktif dalam reformasi ekonomi Arab Saudi

Perubahan sikap pemerintah Arab Saudi ini dianggap menjadi angin segar bagi permasalahan gender ternyata tidak berdampak pada tingkat kesetaraan gender. Selain masih menghadapi diskriminasi di dunia kerja kenyataannya masih banyak peraturan-peraturan lain yang oleh dunia internasional dianggap masih membatasi gerak perempuan di Arab Saudi. Sehingga penting untuk dilakukan analisis yang mendalam mengenai upaya pemberdayaan ekonomi perempuan dan pembentukan peluang yang setara bagi laki-laki dan perempuan sebagai komitmen pemerintah Arab Saudi dalam *Vision 2030*.

1.3 Pertanyaan Penelitian

Dari latar belakang dan rumusan masalah diatas peneliti memutuskan pertanyaan penelitian ini adalah:

Bagaimana upaya pemberdayaan ekonomi perempuan dalam visi Arab Saudi 2030.

1.4 Tujuan Penelitian

1. Mendeskripsikan upaya Arab Saudi dalam *Vision 2030* untuk menciptakan peluang yang setara antara laki-laki dan perempuan
2. Menganalisis upaya pemerintah Arab Saudi dalam memberdayakan ekonomi perempuan sesuai komitmen yang terkandung dalam Visi Arab Saudi 2030.

1.5 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Akademis

Penelitian ini berupaya untuk mengangkat isu ini karena mengingat masih kurangnya literatur yang mengkritisi upaya peningkatan partisipasi perempuan di dunia kerja dalam Visi Arab Saudi 2030. Diharapkan nantinya penelitian ini dapat dijadikan referensi bagi pengembangan ilmu pengetahuan bagi para pengamat fenomena sosial dan politik terutama dalam keilmuan Hubungan Internasional khususnya dalam mengkomparasikan harapan Pemerintah Arab Saudi terkait visinya terhadap peran perempuan dengan hambatan dalam mencapai visi tersebut.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini aplikatif sewaktu-waktu di butuhkan sebagai referensi kebijakan Pemerintah Indonesia dalam memahami kondisi dan situasi dunia kerja bagi perempuan di Arab Saudi mengingat tingginya jumlah tenaga kerja perempuan Indonesia di Arab Saudi serta dalam menghadapi angkatan kerja perempuan dalam gelombang bonus demografi mendatang yang tidak dapat dipungkiri akan menyebar di berbagai lapangan pekerjaan di dunia termasuk Arab Saudi

1.6 Studi Pustaka

Issues and Challenges of Saudi Female Labor Force and the Role of Vision 2030 sebuah artikel karya oleh Sana Naseem dan Kamini Dhruva. Tulisan ini mengelaborasi *Female Labor Force Participation* (FLFP) atau partisipasi tenaga kerja wanita yang memainkan peran penting dalam pembangunan ekonomi. Kerajaan Arab Saudi (KSA), sebagai ekonomi berkembang, lebih mengandalkan laki-laki daripada perempuan untuk mencapai tujuan pembangunannya. Selama 50 tahun, FLFP Saudi sangat rendah. Dalam tulisannya Sana Naseem dan Kamini Dhruva berupaya mengidentifikasi tantangan dan masalah tenaga kerja perempuan di KSA. Penelitian ini menggunakan model regresi, di mana variabel dependen adalah FLFP Rate (FLFPR) dan variabel independen adalah *unemployeement rate* (u-rate) atau tingkat pengangguran, populasi perkotaan, tingkat pertumbuhan dan pendidikan yang lebih tinggi. Hasilnya telah menunjukkan bahwa *u-rate*, dan populasi perkotaan menunjukkan signifikansi statistik pada FLFPR, kecuali pendidikan tinggi¹⁴

Selanjutnya *The new role of women in the new Saudi Arabian economy* sebuah artikel oleh Martin Hvidt. Tulisan ini sebagian besar menyoroti Visi besar dalam konteks ekonomi di balik Visi 2030 adalah untuk mengubah ekonomi Saudi dari salah satu ketergantungan minyak ke ekonomi pasca-minyak. Selama tahun lalu, dengan Muhammed bin Salman sebagai penguasa de facto di Arab Saudi

¹⁴ Sana Naasem, Kamini Dhruva, 2017, *Issues and Challenges of Saudi Female Labor Force and the Role of Vision 2030: A Working Paper*, International Journal of Economics and Financial Issues 2017.

membuat sejumlah reformasi yang khusus menangani kaum muda dan peran para wanita di Arab Saudi.¹⁵

Muhammad bin Salman putra mahkota Arab Saudi ditempatkan sebagai kepala badan pemerintah, yang mengawasi pembuatan rencana pembangunan Visi 2030 dengan total 543 inisiatif reformasi dibuat sebagai rencana ‘Transformasi Nasional 2016-2020’ untuk melaksanakan reformasi. Mohammad bin Salman, putra mahkota muda di Arab Saudi, memang terlihat bersemangat mengejar dorongan reformasi yang diprakarsainya pada tahun 2017 dengan paket reformasi Visi 2030. Keputusannya ini sekaligus menempatkan peran-peran baru bagi perempuan di tengah tengah masyarakat dalam rangka mendukung industri-industri baru dalam diversifikasi ekonominya.

Yang ketiga yaitu *Women’s Economic Empowerment and Entrepreneurship in Agriculture: A Case of Mashonaland West Province in Zimbabwe* artikel karya Evelyn Derera, dalam tulisannya menganalisis pemberdayaan ekonomi perempuan dalam kewirausahaan dan agrikultur, Derera menghantarkan pembaca untuk memahami defenisi pemberdayaan ekonomi perempuan dari berbagai pendapat ahli , memberikan komponen-komponen dan memberikan alat ukur berupa indikator dan poin poin dalam menganalisis pemberdayaan ekonomi perempuan. Bagi Derera tidak semudah itu dalam mengakui negara telah melakukan pemberdayaan ekonomi perempuan , karena ada beberapa komponen

¹⁵ Hvdit Martin, *The new role of women in the new Saudi Arabian economy*, Center for Mellemostudier, Syddansk Universitet, 2018

indikator yang harus dipenuhi negara agar secara empiris dapat dikatakan telah melakukan pemberdayaan ekonomi perempuan.¹⁶

Elaborasi Sarma mengenai *Feminist Political Economy* artikel oleh Saarma R.B adalah yang paling banyak membantu peneliti dalam memahami permasalahan isu ini , dalam tulisannya sarma menjelaskan Feminisasi Angkatan Kerja Ini adalah proses yang berkelanjutan di mana perempuan dalam jumlah yang meningkat memasuki pasar tenaga kerja. Sarma mengambil kritik *feminist political economy* ini dari metode Marxis dalam memahami bagaimana kapitalisme menekan kalangan perempuan.

Ada kegagalan di masyarakat dalam mengkonstruksi apa saja yang dapat dikategorikan sebagai kegiatan ekonomi yang hanya pada lingkup perusahaan dan pasar, sehingga terjadi pengecualian terhadap pekerjaan rumahan karena tidak menghasilkan uang (*unpaid labor of the household*). Sedangkan pekerjaan rumah selama ini secara konstruk sosial dititikberatkan kepada perempuan yang menyebabkan peluang perempuan untuk berkembang secara ekonomi memiliki hambatan yang lebih.

Yang selanjutnya yaitu *Marxist and The Opression of Women* sebuah artikel oleh Martha E. Gimenez. Martha sangat menyoroti metodologi Marx untuk mengidentifikasi kondisi struktural kapitalis dan proses tingkat makro sebagai ketidaksetaraan antara laki-laki dan perempuan perempuan dalam masyarakat kapitalis; dan batas politik dan perubahan hukum untuk mengakhiri ketidaksetaraan gender. Penindasan perempuan adalah efek yang terlihat dan dapat diamati seperti

¹⁶ Sarma R. B, *Feminist Political Economy*, In Kitchin R, Thrift(eds) International Encyclopedia of Human Geography,Oxford: Elsevier, 2018

di pasar tenaga kerja, dalam stratifikasi sosial ekonomi, pembagian kerja domestik, struktur otoritas birokrasi dari hubungan mendasar antara pria dan wanita ditentukan oleh artikulasi antara cara produksi kapitalis.

Feminisme, untuk tetap relevan bagi mayoritas perempuan, oleh karena itu, harus mengakui bahwa sebagian besar perempuan wanita pekerja yang nasibnya, dan keluarga mereka, dibentuk baik oleh penindasan gender dan eksploitasi kelas bagaimana kapitalisme menekan perempuan. Meskipun Marx tidak menulis secara spesifik dan panjang lebar tentang penindasan perempuan, karyanya adalah sumber metodologis dan wawasan teoritis yang diperlukan untuk memahami penindasan perempuan di bawah kapitalisme.

Penindasan terhadap wanita memunculkan berbagai fenomena psikologis, ekonomi, sosial dan politik mempengaruhi kehidupan perempuan, mulai dari pemerkosaan, kekerasan dalam rumah tanggadan pelecehan seksual, akibat stereotip sosial, pekerjaan bergaji rendah dan berdasarkan gender, diskriminasi dalam institusi pendidikan dan pekerjaan, pembagian kerja secara seksual, kerja rumah tangga dan kontradiksi antara tuntutan rumah tangga dan pekerjaan, masalah reproduksi dan perjuangan untuk menentukan nasib sendiri, kurang terwakilinya perempuan dalam jabatan politik dan peran kepemimpinan dimasyarakat dampak dari sistem patriarki.

Beberapa penelitian diatas membantu penulis untuk memahami permasalahan utama yang dihadapi perempuan Arab Saudi dalam upaya meningkatkan kemampuan mereka sosial dan ekonomi sebelum Visions 2030 diluncurkan, namun setelah peluncuran Visions 2030 dunia hanya mengetahui bahwa Arab Saudi telah merubah sikap dan melakukan pemberdayaan dengan baik

terhadap perempuan ditandai dengan menurunnya kritik media terhadap kesetaraan gender di Arab Saudi. Sehingga hasil dari penelitian ini merupakan bukti yang penting dalam memahami mengukur sejauh mana upaya yang dilakukan pemerintah Arab Saudi dalam komitmennya melakukan pemberdayaan ekonomi perempuan dan menciptakan peluang kesetaraan

1.7 Kerangka Konseptual

1.7.1 Pemberdayaan Ekonomi Perempuan

Untuk saat ini belum ada definisi pemberdayaan ekonomi perempuan yang disepakati secara umum namun beberapa peneliti telah mengajukan definisi yang berbeda. Misalnya, Moyle et al (2006) mendefinisikan pemberdayaan ekonomi sebagai kemampuan untuk menghasilkan pendapatan yang mengutamakan pengambilan keputusan secara independen dalam menggunakan pendapatan. Kabeer (2012) sependapat bahwa pemberdayaan ekonomi adalah tentang membuat perempuan berperan di tingkat kebijakan ekonomi dan memberdayakan perempuan untuk bersaing di kegiatan ekonomi.

Pemberdayaan ekonomi juga dapat didefinisikan sebagai peningkatan kapasitas perempuan untuk berpartisipasi, berkontribusi dan mendapat manfaat dari proses pertumbuhan dengan cara yang mengakui nilai kontribusi mereka, menghormati martabat mereka dan memungkinkan negosiasi dengan distribusi manfaat pertumbuhan yang lebih adil (OECD, 2011).¹⁷ Mosedale (2005) dan Choudhury (2009) mendefinisikan pemberdayaan ekonomi perempuan sebagai

¹⁷ Evelyn Derera “*Women’s Economic Empowerment and Entrepreneurship in Agriculture: A Case of Mashonaland West Province in Zimbabwe*”.Universiti of Khwazulu.2015

memiliki akses dan kontrol atas sarana untuk mencari nafkah secara berkelanjutan dan jangka panjang, dan menerima manfaat material dari akses dan kontrol ini.

Dalam penelitian ini peneliti berusaha mengukur upaya pemberdayaan ekonomi perempuan menggunakan komponen – komponen berikut :

1. Agency

Agensi merujuk pada kebebasan kepada individu untuk terlibat dalam proses pembuatan keputusan atas hal-hal yang menurut mereka penting. Kabeer mendeskripsikan agensi sebagai kemampuan seseorang untuk merancang tujuan dan bertindak untuk mencapainya. Dan bagi Alkire lawan kata dari agensi adalah “dipaksa, ditekan, pasif”. Artinya agensi merupakan komponen vital dalam menciptakan pilihan hidup bagi individu, khususnya dalam rangka memberikan pemberdayaan ekonomi baginya. Situasi dimana individu masih dalam posisi pasif, mengalami tekanan atau paksaan menunjukkan rendahnya kebebasan baginya untuk menciptakan peluang dan mencapai tujuan-tujuannya.¹⁸

2. Resources

Resources atau sumber daya tidak hanya di identifikasikan sebagai materi namun kepada manusia dan sosial. Artinya individu dapat meraih peluang pemberdayaan ekonominya tidak hanya dari aspek materil namun juga dari kesempatan membangun relasi dengan yang lain termasuk klaim dan harapan masa depan serta alokasi aktual. Markel membuktikan bahwa sumber daya lebih dari sekadar finansial atau moneter. Contoh sumber daya yang memungkinkan kemajuan ekonomi perempuan meliputi: sumberdaya manusia (mis. Pendidikan,

¹⁸ Evelyn Derera, 2015, “*Women’s Economic Empowerment and Entrepreneurship in Agriculture: A Case of Mashonaland West Province in Zimbabwe*”.Universiti of Khwazulu

keterampilan, pelatihan); modal finansial (mis. pinjaman, tabungan); modal sosial (mis. jaringan, mentor) dan modal fisik (mis. tanah, mesin) .¹⁹

3.Opportunity Structure

Agency, *resources*, dan *achievement* tergantung pada struktur kelembagaan (juga disebut sebagai struktur peluang) yang memengaruhi peluang yang tersedia bagi masyarakat. Menurut Samman dan Santos, struktur peluang mengacu pada "konteks kelembagaan, sosial, dan politik yang lebih luas dari aturan dan norma formal dan informal di mana aktor mengejar kepentingan mereka". Agensi merupakan kebebasan dalam proses, proses-proses ini dibentuk oleh institusi dan dijalani oleh masyarakat. Hukum, norma, kebiasaan formal dan informal menentukan apakah individu dan kelompok memiliki akses terhadap aset, dan apakah orang-orang ini dapat menggunakan aset untuk mencapai hasil yang diinginkan. Norma-norma yang mencakup peran, tabu, larangan, dan ekspektasi gender seperti layak atau tidaknya perempuan berada di ruang publik, memegang jenis pekerjaan tertentu, atau mengelola keuangan.

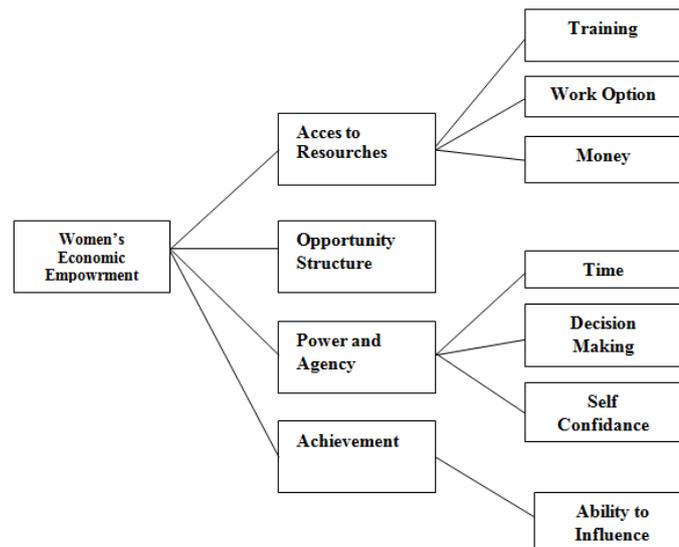
4.Achievement

Prestasi merujuk pada hasil dari agensi yang baik. Keyakinan individu bahwa mereka memiliki kemampuan dan peluang untuk melakukan kontrol atas hal-hal yang mempengaruhi kehidupan mereka. *Achievement* yang didapatkan dari proses agensi dan kompetisi yang baik memberikan kepercayaan diri pada individu serta kemampuan untuk memberikan pengaruh bagi sekitarnya. Sebaliknya, juga dimungkinkan bahwa wanita memilih- untuk tidak berpartisipasi dalam sektor

¹⁹ Evelyn Derera, 2015, "*Women's Economic Empowerment and Entrepreneurship in Agriculture: A Case of Mashonaland West Province in Zimbabwe*". Universiti of Khwazulu

tertentu yang justru dinilai sebagai hasil pemberdayaan misalnya enggan berpartisipasi di politik.

Komponen-komponen diatas harus tercipta sebagai sebuah pola yang mendukung dan menentukan berhasil atau tidaknya upaya pemberdayaan ekonomi perempuan yang disederhanakan menjadi pola berikut:



Gambar 1.1 Komponen Pemberdayaan Ekonomi Perempuan

(Sumber : Evelyn Derera,2015, "*Women's Economic Empowerment and Entrepreneurship in Agriculture: A Case of Mashonaland West Province in Zimbabwe*".Universiti of Khwazulu p-62)

Sehingga pemberdayaan ekonomi perempuan merupakan situasi tersedianya keempat komponen tersebut bagi individu, dalam kasus pemberdayaan ekonomi dalam Visi 2030 komponen ini justru belum terpenuhi di beberapa aspek, maka dari itu penelitian ini mencoba mengukur bagaimana upaya yang dilakukan dan sejauh mana upaya tersebut telah di laksanakan.

Pemberdayaan ekonomi memungkinkan perempuan untuk meningkatkan stabilitas ekonomi keluarga untuk kesejahteraan mereka dan anak-anak mereka yang sebenarnya menjadi perhatian utama dalam paradigma pengentasan

kemiskinan dan angka pengangguran. Kontrol perempuan atas pengambilan keputusan juga bermanfaat bagi pria melalui pencegahan kekacauan ekonomi rumah tangga untuk menganalisis upaya peningkatan partisipasi perempuan di dunia kerja atau yang dikenal sebagai *Female Labour Force Participation (FLFP)* dalam Visi Arab Saudi 2030 peneliti menggunakan konsep pemberdayaan ekonomi perempuan. Penelitian ini mencoba mengukur upaya pemberdayaan ekonomi perempuan pemerintah dalam Visi Arab Saudi 2030 secara empiris terhadap target dan inisiatif tertentu yang telah dilakukan. Seiring meningkatnya upaya pemberdayaan ekonomi perempuan dalam beberapa tahun terakhir, dua pertanyaan muncul: bagaimanakah pemberdayaan ekonomi perempuan diukur dan dievaluasi sehingga dapat menunjukkan bahwa mereka ada di jalur yang benar untuk mencapai tujuannya.

Jawaban untuk pertanyaan ini sangat penting untuk menganalisis desain strategi pemberdayaan ekonomi perempuan. Sehingga menggunakan konsep ini peneliti akan menjelaskan: definisi pemberdayaan ekonomi perempuan, kerangka pengukuran terhadap rancangan, implementasi dan evaluasi program pemberdayaan menggunakan indikator-indikator yang telah di tentukan.²⁰

1.8 Metode Penelitian

1.8.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian

Untuk mencapai tujuan dari penelitian ini metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif, yakni metode yang lebih bergantung pada data-data linguistik dibanding data-data numerik yang kemudian digunakan dalam dalam analisa data. Meskipun begitu data numerik tetap di

²⁰ Anne Marie Golla, Anju Malhotra, Priya Nanda, and Rekha Mehra Understanding and Measuring Women's Economic Empowerment, 2011

gunakan untuk membantu proses analisis. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang berupaya melihat kebenaran-kebenaran namun di dalam melihat kebenaran tersebut, tidak selalu mampu didapat dengan melihat sesuatu yang nyata akan tetapi kadang kala perlu pula melihat sesuatu yang bersifat tersembunyi dan melacaknya lebih jauh kebalik sesuatu yang nyata tersebut.

Penelitian deskriptif berfungsi untuk mendeskripsikan, menjelaskan dan menginterpretasikan kondisi-kondisi kontemporer, penelitian ini fokus terhadap kondisi, praktek, stuktur dan perbedaan atau hubungan yang ada, opini serta proses yang sedang berlangsung atau menjadi trend pada waktu tertentu. Adapun penelitian deskriptif analisis tidak hanya berhenti pada deskripsi serta penjelasan tentang kondisi semata, namun juga melibatkan proses identifikasi dan interpretasi dari data-data yang telah dideskripsikan sebelumnya.

1.8.2 Batasan Penelitian

Agar penelitian ini tidak meluas dari apa yang telah dirumuskan, peneliti membatasi pada analisis pada upaya pemerintah Arab Saudi dalam menyediakan peluang yang setara untuk seluruh golongan dan meningkatkan partisipasi perempuan di dunia kerja dalam Visi 2030 yang telah dilaksanakan semenjak April 2016 hingga tahun 2019. Maka tahun batasan penelitian ini adalah dari tahun 2016 hingga tahun 2019.

1.8.3 Unit dan Tingkat Analisis

Unit analisis atau variabel dependen merupakan objek kajian yang perilakunya akan diteliti dan dianalisis. Dengan demikian yang menjadi unit Analisis dalam penelitian ini adalah upaya pemberdayaan ekonomi perempuan

dalam Visi Arab Saudi 2030. Sementara itu, unit eksplanasi atau variabel independen merupakan unit yang dapat mempengaruhi perilaku unit analisis. Dalam hal ini yang menjadi unit eksplanasi adalah Visi Arab Saudi 2030. Selanjutnya, level analisis atau tingkat analisis merupakan tingkat atau posisi dari objek kajian yang akan diteliti atau dianalisis. Tingkat analisis penelitian ini berada pada level negara. Hal tersebut dikarenakan dalam penelitian ini, penulis akan menjelaskan bagaimana upaya yang dilakukan pemerintah Arab Saudi dalam mencapai visinya meningkatkan partisipasi perempuan di dunia kerja untuk menciptakan peluang yang setara bagi seluruh golongan masyarakatnya

1.8.4 Teknik Pengumpulan Data

Library research atau studi kepustakaan merupakan teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini. Peneliti kemudian mengumpulkan fakta dan data-data tertulis dari berbagai sumber. Data-data yang dikumpulkan adalah data primer yang didapat website resmi pemerintah Arab Saudi www.saudi.gov.sa, dari website *General Organization for Social Insurance of Saudi Arabia* yaitu www.gosi.gov.sa serta website resmi Visions 2030 yaitu vision2030.gov.sa/en.

Sedangkan data sekunder didapat dari jurnal ilmiah dan hasil penelitian yang terkait dengan partisipasi perempuan Arab Saudi di dunia kerja sebelum peluncuran Visi 2030 yang kemudian di korelasikan dengan pelaksanaan Artikel CEDAW dan setelah peluncuran Visi 2030. Data-data lainnya yang digunakan adalah peran media sebagai promotor informasi mengenai suksesnya pemberdayaan perempuan di Arab Saudi lalu mengkomparasikannya dengan data hambatan gender dan diskriminasi gender serta artikel jurnal yang fokus pada

hambatan dan tantangan perempuan Arab Saudi dalam sistem masyarakat dan terkhusus sistem dunia kerja

1.8.5 Teknik Analisis Data

Untuk menjawab pertanyaan penelitian ini, peneliti melakukan analisis data dengan melalui beberapa tahap. Pertama adalah tahap pengelompokan data. Pada tahap ini, peneliti mengelompokkan data-data yang sudah dikumpulkan kedalam beberapa kategori sesuai dengan alur penelitian ini. Dalam tahap ini, peneliti melakukan penyeleksian terhadap data-data yang tidak terlalu relevan dengan penelitian yang akan dianalisis agar dapat membantu menjawab permasalahan yang diteliti termasuk masifnya publikasi mengenai kesuksesan pemerintah baru Arab Saudi dalam memberdayakan perempuan. Ketiga adalah analisis data, menggunakan komponen pemberdayaan ekonomi perempuan. Derera, peneliti mencoba mengukur:

1. *Agensi* : Apakah upaya pemberdayaan ini meliputi proses yang melibatkan perempuan dalam proses-proses pembuatan keputusan
2. *Resources* : Apakah upaya pemberdayaan ini meliputi peningkatan aksesibilitas perempuan terhadap hal-hal yang termasuk kepada *resources* ekonomi seperti sumberdaya manusia (mis. Pendidikan, keterampilan, pelatihan); modal finansial (mis. pinjaman, tabungan); modal sosial (mis. jaringan, mentor) dan modal fisik (mis. tanah, mesin
3. *Opportunity Structure* : Apakah pemberdayaan ini secara politik dan kelembagaan telah meningkatkan peluang yang lebih besar bagi perempuan termasuk kedalamnya atura-aturan dan norma yang berpengaruh besar dalam kehidupan perempuan

4. *Achievement* : Apakah upaya pemberdayaan ini meningkatkan prestasi dan perahian dalam kehidupan perempuan yang akan berdampak pada tingkat kepercayaan diri untuk memberikan pengaruh Sehingga pada akhir penelitian didapatkan hasil analisis terhadap upaya pemberdayaan ekonomi perempuan pada masa implementasi komitmen Visi 2030 telah memberdayakan ekonomi perempuan di Arab Saudi.

1.9 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini akan dimuat penjelasan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, studi pustaka sebagai bahan rujukan dan pembanding penelitian, kerangka konseptual yang akan digunakan untuk menganalisis topik penelitian, metode penelitian, unit analisa dan tingkat analisa, teknik pengumpulan data serta teknik analisa data.

BAB II SAUDI VISION 2030: PANDANGAN GLOBAL DAN KORELASINYA DENGAN KEHIDUPAN PEREMPUAN ARAB SAUDI

Bab ini akan menjelaskan mengenai peluncuran Visi Arab Saudi 2030 yang dilakukan oleh Mohammed Bin Salman, target dan prospek masa depan yang di harapkan pemerintah Arab Saudi,

BAB III KONDISI PEREMPUAN ARAB SAUDI PASCA PELUNCURAN VISI 2030

Pada bab ini peneliti akan menjelaskan fakta dalam implementasi upaya Pemerintah MBS dalam meningkatkan partisipasi perempuan di dunia kerja dalam Visi 2030 yang telah dilakukan semenjak April 2016 hingga sekarang termasuk fakta yang dihadapi perempuan dalam kompetisi mendapatkan pekerjaan, Saudi jenis pekerjaan, adanya kontrol terhadap media serta skandal pembunuhan jurnalis yang memiliki korelasi terhadap branding Visi 2030.

BAB IV ANALISIS UPAYA PEMBERDAYAAN EKONOMI PEREMPUAN DALAM VISI ARAB SAUDI 2030

Bab ini menjelaskan analisis secara keseluruhan terhadap upaya-upaya peningkatan partisipasi perempuan di dunia kerja dalam Visi Arab Saudi 2030 menggunakan konsep pemberdayaan ekonomi perempuan sehingga menghasilkan kesimpulan dan saran peneliti terhadap pelaksanaan pemberdayaan ekonomi perempuan dalam Visi 2030 .